KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sejahterakan nelayan, program KNMP perlu integrasi
Tanggal : Minggu, 08 November 2026
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Sejahterakan Nelayan

Program KNMP Perlu Integrasi

ANGGOTA Komisi IV DPR I Nyoman Adi Wiryatama mendorong pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tujuannya agar fasilitas yang dibangun Pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan nelayan.

Integrasi tersebut, kata Adi, membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat (Pempus), Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab), serta masyarakat nelayan. "Kita harus *integrated* semua, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Tidak boleh berpikir parsial (terpisah)," kata Adi dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).

Diketahui, KNMP adalah sebuah Program Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi pesisir, meningkatkan kesejahteraan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), serta mengintegrasikan rantai pasok perikanan dari hulu ke hilir (produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran.

Hingga November 2026, sebanyak 100 KNMP telah terbangun dan resmi beroperasi di Indonesia. Selanjutnya, sebanyak 1.369 titik KNMP terbangun dan siap beroperasi hingga akhir tahun 2026. Sedangkan jangka panjang akan dibangun sebanyak 5.000 titik KNMP di seluruh pesisir Indonesia pada tahun 2029.

Adi melanjutkan, program KNMP memiliki tujuan baik karena tidak hanya menyentuh aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga mencakup pengelolaan hasil tangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran. Apalagi, Pemerintah telah merancang berbagai fasilitas pendukung. Mulai dari alat tangkap, tempat penyimpanan hasil perikanan hingga sarana pemasaran.

"Dukungan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perikanan yang berkelanjutan," imbuh politisi PDIP ini.

Namun, ia mengingatkan, seluruh fasilitas tersebut harus terintegrasi dalam pelaksanaannya. Sebab, masih terdapat persoalan distribusi BBM yang berpotensi menghambat aktivitas nelayan. Contohnya, keluhan nelayan di Pulau Bali yang mengalami kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut. Akibatnya, nelayan tidak dapat berangkat menangkap ikan meskipun telah mempersiapkan perbekalan dan kebutuhan melaut sejak beberapa hari sebelumnya.

Ia juga menyoroti penguatan manajemen dalam pengelolaan KNMP. Fasilitas penyimpanan hasil tangkapan atau storage membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan pengelolaan memadai agar dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi.

Begitu juga dengan persoalan permodalan koperasi nelayan, kata Adi, juga membutuhkan perhatian. Koperasi membutuhkan modal awal yang cukup untuk membeli hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan kembali. "Bagaimana koperasi mengambil tangkapan nelayan kalau tidak ada modal awal? Itu perlu kita pikirkan bersama," kata legislator asal Bali ini.

Adi berharap, Pemerintah secara bertahap dapat memenuhi berbagai kebutuhan pendukung tersebut. Meski demikian, fasilitas yang telah dibangun mesti terlebih dahulu dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat. ■ TIF